



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023, maka perlu melakukan penyesuaian tentang tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Boalemo 2021-2025;

b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelerasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan, sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

KABAG HUKUM	DIREKTOR KANTOR	AS	SEKDA	WASUP

- 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 - 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Boalemo Nomor 34 tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2021-2025 diubah menjadi senagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
				

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 10 Juli 2023

Pj. BUPATI BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal, 10 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


SUPANDRA NUR

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR 29)

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 29 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 Juli 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021-2025

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2021-2025**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan reforasi birokrasi di Kabupaten Boalemo sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 telah banyak memberikan kemajuan. Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan RB menunjukkan peningkatan nilai setiap tahunnya. Kemajuan pelaksanaan RB Kabupaten Boalemo dapat dilihat dari pencapaian dalam melakukan perubahan seperti :

- Terbentuknya Agen Perubahan yang saat ini telah mendorong seluruh perangkat daerah dalam melahirkan inovasi untuk mempermudah pelaksanaan kinerja OPD dan pelayanan terhadap masyarakat sehingga Kabupaten Boalemo telah masuk pada Kategori Daerah Inovatif
- Malaksanakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional sebanyak 194 ASN atau 100% dari seluruh jabatan yang diidentifikasi untuk disetarakan
- Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam peraturan tersebut jumlah dinas menjadi 16 yang sebelumnya 18 dinas
- Menetapkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
- Penyusunan produk hukum daerah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan lainnya
- Peningkatan nilai indeks SPBE pada tahun 2022 telah mencapai nilai 2,02
- Nilai akuntabilitas kinerja naik dari predikat CC ke B pada tahun 2020
- Telah memperoleh WTP selama 7 kali berturut-turut
- Nilai Maturitas SPIP sudah berada pada level 3
- Pelaporan LHKPN dan LHKSAN 100% setiap tahunnya
- Peningkatan kualitas pelayanan publik telah berada pada Nilai 76,31 sesuai penilaian Ombudsman RI dan nilai 3,99 hasil penilaian KemenPANRB di tahun 2022

KABAG HUKUM	DINAS/DAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
1	6	1	2	

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada perubahan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi berdampak, Pemerintah Kabupaten Boalemo menyusun Road Map RB penajaman sebagai tindak lanjut dari PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023. Road Map ini sebagai rencana teknis dan detail pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2024 untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Tentunya dalam pelaksanaannya tidaklah mudah, sehingga membutuhkan komitmen dan dukungan sumberdaya yang memadai. RB Tematik merupakan kebijakan pemerintah yang dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan nyata ditengah masyarakat melalui tema penanggulangan kemiskinan, peningkatan investas, digitalisasi administrasi pemerintahan, penggunaan produk dalam negeri dan inflasi. Kondisi Kabupaten Boalemo berdasarkan tema-tema tersebut beserta permasalahannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan telah menjadi program prioritas di Kabupaten Boalemo baik dalam RPJMD 2017-2022 dan RPD 2023-2026. Persentase kemiskinan di tahun 2022 sebesar 18,74% tertinggi dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Seharusnya kondisi ini bukanlah hasil yang diharapkan jika pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan daerah. Hasil identifikasi masalah yang diperoleh adalah penanganan pengentasan kemiskinan masih bersifat pasial, tidak adanya kolaborasi secara menyeluruh dalam pelaksanaannya dan dukungan sumberdaya yang terbatas.
2. Nilai investasi Kabupaten Boalemo masih sangat rendah yaitu 13,4 milyar di tahun 2022 dan terendah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Hal ini disebabkan oleh minimnya kebijakan pemerintah daerah pada sektor-sektor yang memengaruhi peningkatan investasi, rendahnya pengawasan terhadap para pelaku usaha serta promosi peluang investasi.
3. Digitalisasi administrasi pemerintahan di Kabupaten Boalemo sudah mengalami kemajuan, hal ini dibuktikan dengan nilai Indeks SPBE 2,02 di tahun 2022. Capaian ini walaupun telah melampaui target RPD di tahun 2023, upaya perbaikanpun tetap dilakukan dengan dukungan kebijakan tentang pemerintahan berbasis elektronik dan memaksimalkan pemanfaatan emplikasi E-Data Sektor yang merupakan media satu data Kabupaten Boalemo
4. Penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Boalemo telah menunjukkan capaian yang baik yaitu 62%. Capaian ini telah melampaui target nasional 40%. Meski demikian tetap dilakukan upaya yang lebih maksimal melalui

KABAG HUKUM	DINASIBIDAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
1	6	1	7	

pembinaan terhadap penyedia barang/jasa untuk meningkatkan kualitas mutu dan produk dalam negeri

5. Nilai inflasi Kabupaten Boalemo telah mencapai 4.6 dibandingkan Provinsi Gorontalo pada akhir Tahun 2022 masih pada posisi 5,15. Pencapaian ini belum masuk pada kategori inflasi yang stabil sehingga perlu meningkatkan pengawasan harga pada pasar tradisional maupun pasar modern.

Berdasarkan uraian diatas pemerintah Kabupaten Boalemo lebih berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan nilai investasi daerah dan inflasi melalui program dan kegiatan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 serta ketersediaan anggaran daerah.

a. Pengentasan Kemiskinan

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
- Program Penyediaan dan pengembangan sarana Pertanian
- Program Pengelolaan Perikanan tangkap
- program Pengelolaan perikanan budidaya
- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Pengembangan Umkm
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- Program pengembangan Perumahan
- Program Perumahan dan kawasan pemukiman kumuh
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

b. Peningkatan Nilai Investasi

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
- Pariwisata

c. Digitalisasi Pemerintahan

KABAG HUKUM	DINASIBEDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WAGUP
f	h	f	h	

- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- Program Informasi Dan Komunikasi Publik
- Program Aplikasi Informatika

d. Penggunaan Produk Dalam Negeri

- Program Perekonomian Dan Pembangunan

e. Inflasi

- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- Program Perekonomian Dan Pembangunan

Dari program-program diatas diharapkan bisa menjadi media semua komponen dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo guna tercapainya sasaran dan target reformaasi birokrasi serta dalam pelaksanaannya mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Boalemo.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tatakelola pemerintahan. Reformasi birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan mengambil langkah strategis dan berkelanjutan guna membangun dan memperbaiki aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui perubahan proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat. Tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dan kede etik aparatur negara.

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, harmonisasi dan pelurusan (*streamlining*) berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem Sumber Daya Manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Reformasi birokrasi saat ini masih berkulat dalam urusan administrasi, namun dampak untuk masyarakat belum dapat dirasakan secara signifikan. Dengan kondisi seperti itu Kementerian PANRB melakukan penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Salah satu fokus penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2024 adalah mempertajam tujuan, sasaran dan indikator RB agar lebih relevan dan berdampak. Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan nasional, masih

KABAG HUKUM	DINASIBAGAN KANTOR	ASS	SEKDA	WADUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain.

Strategi yang digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan *output* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Reformasi birokrasi disusun dalam sebuah grand design reformasi birokrasi Indonesia 2010-2025 yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan penyusunan road map reformasi birokrasi setiap lima tahun. Road map tersebut disusun sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi. Walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode road map terakhir hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial, sehingga dengan kondisi ini perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB Kabupaten Boalemo Tahun 2021-2025 sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023.

Aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB ini adalah sebagai berikut :

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indicator keberhasilan RB dalam Road Map Kabupaten belum sepenuhnya menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas instansi (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-

KAB. BOALEMO	DINAS IB/BUM. KANTOR	ASPIRAN	SEKDA	WAKIL

kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB

3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal serta isu prioritas anatara lain kemiskinan dan investasi.
4. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (fragmented) khususnya anatar instansi pengampuh indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Terkait dengan hal tersebut, penajaman road map reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Boalemo Menyusun perubahan *road map* reformasi birokrasi 2023-2024 sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Penyusunan Road Map RB Pemerintah Kabupaten Boalemo dilakukan dengan berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD) dan memeperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan. Road Map RB disusun dengan mengutamakan prioritas pembangunan nasional (tata Kelola pemerintahan berbasis digitalisasi, peningkatan investasi, pengendalian inflasi dan belanja produk dalam negeri) yang capaiannya akan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kedepan (2023-2024).

B. Tujuan Penajaman Road Map RB

Road Map RB harus mampu menjabarkan visi, misi dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata Kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Adapun penajaman terhadap Road Map RB dengan tujuan :

1. Mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB melalui pelaksanaan RB dalam jangka waktu 2 tahun (2023-2024) sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat yang didasarkan pada Langkah-langkah konkrit yang tertuang dalam 5 (lima) pilar RB berdampak dan aspek tematik, baik yang sifatnya penguatan dan perbaikan maupun gagasan baru, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas berfokus pada penurunan angka kemiskinan, peninngkatan

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WASUP
1	1	1	1	

investasi, pengendalian inflasi daerah, digitalisasi pelayanan administrasi pemerintahan serta penggunaan produk dalam negeri.

2. Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat
3. Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.
4. Menjadi pedoman bagi aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan
5. Menjadi tolok ukur supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2024 yang berdampak dan tematik

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen Road Map RB Pemerintah Kabupaten Boalemo tahun 2023-2024, memuat 4 (empat) substansi pokok, yaitu :

1. Ringkasan eksklusif, memuat uraian singkat tentang substansi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo yang mencakup capaian reformasi birokrasi periode sebelumnya, identifikasi masalah, fokus perubahan, program dan kegiatan, Quick Wins dan indikator keberhasilan
2. Pendahuluan, memuat uraian tentang :
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Penajaman Road Map
 - c. Ruang Lingkup
3. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo, meliputi :
 - a. Tujuan dan Sasaran RB
 - b. Perencanaan RB General
 - Penetapan Prioritas Kegiatan Utama
 - Penetapan Target Kegiatan Utama
 - c. Penetapan Tema dan Target RB Tematik
4. Manajemen Pelaksanaan RB
5. Penutup

KABAG HUKUM	DINAS/DADAN KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
f	h	d	g	

BAB II
GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

A. Kondisi Eksisting Sesuai Perubahan Road Map RB 2023-2024

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025. Melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penajaman Road Map 2020-2024 yang berfokus pada penajaman tujuan, sasaran dan indikator.

Jika dilihat dari pencapaian indeks reformasi birokrasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang mengacu pada 8 (delapan) area perubahan dari tahun 2019 atau sejak Kabupaten melakukan penilaian mandiri mengalami peningkatan nilai indeks setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan terhadap implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Boalemo walaupun masih pada predikat CC. Pencapaian Kabupaten Boalemo memang masih jauh dari apa yang diharapkan namun dengan kondisi tersebut dapat merefleksi seluruh stakeholder agar melakukan upaya-upaya konkrit dalam mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Boalemo.

Hasil yang telah dicapai dan target capaian RPD 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator setelah perubahan penajaman Road Map 2020-2024 dapat dinyatakan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
 Capaian berdasarkan tujuan RB

N O	TUJUAN RB 2020-2024	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2024 (Nasional)	CAPAIAN			
				2022	2023	2024	2025
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah	70% Kab/Kota Minimal Baik	56,22 (Cukup)	56 (Cukup)	58 (Cukup)	60 (Cukup)
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan	7% Angka Kemiskinan (9,71 /Sep 2021)	18,74	18,57	18,14	17,71

KABAG HUKUM	DINAS/BAKOR KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
1	6	1	7	

	Investasi)	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi (9,0% 2020/2021)	-	-	-	
--	------------	--	---	---	---	--

Tabel 2.2
Capaian berdasarkan sasaran strategis RB

NO	SASARAN STRATEGIS RB 2020-2024	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024 (Nasional)	CAPAIAN	TARGET RPD		
				2022	2023	2024	2025
1.	Terciptanya tata kelola pemerintah digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	1,49 (Cukup)	1,7 (Cukup)	2,0 (Cukup)	2,4 (Cukup)
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
		Capaian kuantabilitas Keuangan	WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding (sumber: Kementerian PANRB)	7,66%	-	-	-	-
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PANRB)	67,14%	62,2	-	-	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas (KPK)	Meningkat dari 71,4%	69,70	-	-	-
		Nilai Survei Kepuasan masyarakat (sumber: Kementerian PANRB)	Meningkat dari 74,89	85,6	-	-	-

Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Tabel 2.3
Capaian Indeks RB Kabupaten Boalemo

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	2019	2020	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit					
	I. Pemenuhan	20		9,23	9,3	9,58
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10		4,52	5,2	5,39
	III. Reform	30		10,41	10,13	10,67
	Total Komponen Pengungkit	60	22,45	24,15	24,63	25,64
B.	Komponen Hasil					
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10		7,33	7,43	7,4
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10		8,2	8,49	8,82
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10		8,23	7,6	8,63
4.	Kinerja Organisasi	10		5,88	6,71	5,73
	Total Komponen Hasil	40	29,51	29,64	30,23	30,58
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100	51,96	53,79	54,86	56,22

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

A. Tujuan dan Sasaran RB

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran RB Kabupaten Boalemo berdasarkan tujuan dan sasaran RB Nasional yakni sebagai berikut :

1. Tujuan RB yaitu Birokrasi Yang Bersih, Efektif, dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada pembangunan nasional, peningkatan kualitas pelayanan public, penciptaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding negara lain
2. Sasaran RB disederhanakan menjadi 2 aspek yaitu :
 - Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
 - Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi

KABAG HUKUM	DINASIBAGAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WAEUP
1	1	1	1	

B. Perencanaan RB General

Kegiatan RB setelah penajaman Road map 2020-2024 tidak lagi diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan melainkan berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*) yang meliputi terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya melalui prioritas kegiatan utama RB General.

1. Prioritas Kegiatan Utama

Dalam menetapkan prioritas kegiatan utama RB Kabupaten Boalemo disesuaikan dengan Road Map RB Nasional dengan melaksanakan RB dalam 2 dimensi yaitu :

- Dimensi Prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh Level Makro dan Meso berupa kegiatan utama yang sifatnya mandatory
- Dimensi Instansional merupakan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah (*diluar kegiatan utama mandatory*) yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB

Prioritas kegiatan utama yang ditetapkan (mandatory) berdasarkan sasaran strategis RB nasional diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Kegiatan Utama RB General

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
		Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
		Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	- Indeks SPBE - Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*
		Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	- Indeks Perencanaan Pembangunan - Nilai SAKIP
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*
		Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI
		Penguatan implementasi 17system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)
		Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indkes Kualitas Kebijakan Publik
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum
		Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Asrsip
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	- Opini BPK - Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
2.	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional
		Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta
		Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN
		Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit
		Pelaksanaan Core Values ASN	- Indeks Berakhlak* - Employer Branding*
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - Indeks Pelayanan Publik

(* dalam konfirmasi dengan K/L level Meso)

Berdasarkan prioritas kegiatan utama diatas perlu melakukan identifikasi tingkat prioritas pada kegiatan utama, hal ini dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya Pemerintah Kabupaten Boalemo, maka hasil identifikasi yang dilakukan akan menentukan kegiatan utama mana yang segera dilaksanakan atau dipertimbangkann dalam menetapkan target tahunan RB.

2. Target Kegiatan Utama

Dalam melaksanakan kegiatan utama perlu menetapkan target capaian kegiatan utama yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan memperhatikan target minimal Road Map RB Nasional. Target kegiatan utama setelah dilakukan identifikasi prioritas memberikan kemudahan atau ruang gerak bagi pemerintah daerah dalam memenuhi indikator-indikator kegiatan utama.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASN	SEKDA	WADUP
<i>f</i>	<i>h</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	

Tabel 3.2

Target Kegiatan Utama RB General

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	BASELINE (2022)	TARGET TAHUNAN			UNIT / SATUAN KERJA PELAKSANA	
					2023	2024	2025	KOORDINATOR	PELAKSANA
1.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100	100	100	100	SETDA	Seluruh PD
		Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	N/A	50	75	100	BKD-DIKLAT	Seluruh PD
		Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,02	2,5	3	3,2	Dinas Kominfo	Seluruh PD
		Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	Naik	Naik		Dinas Kominfo	Seluruh PD
			Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Baik	Baik	Baik	BAPPEDA	Seluruh PD
			Nilai SAKIP	62,91	67,3	69,6	73,1		
			Perencanaan Kinerja	21,3	22	22,7	23,5	BAPPEDA	Seluruh PD
			Pengukuran Kinerja	21,87	22,4	22,9	23,7	BAPPEDA	Seluruh PD
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Pelaporan Kinerja	9,14	11	11,5	12,4	SETDA	Seluruh PD
			Evaluasi Kinerja	10,6	11,9	12,5	13,5	Inspektorat	Seluruh PD
			Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	N/A	Baik	Baik	Baik	DPM-PTSP	Seluruh PD
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	N/A		1	2	3	Inspektorat	Seluruh PD		
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	3		3	3	3	Inspektorat	Seluruh PD		

KABAG HUKUM	DINASIBADAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	1

	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Dinas Kominfo	Seluruh PD
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	69,7	72	74	77	Inspektorat	Seluruh PD	
	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	50	55	60	SETDA	Seluruh PD	
	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	50	55	60	SETDA	Seluruh PD	
	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	N/A	50	55	60	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah	Seluruh PD	
	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	2,3	2,5	2,8	Dinas Kominfo	Seluruh PD	
	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	55	57,5	60	62,5	SETDA	Seluruh PD	
	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat, BKAD	Seluruh PD	
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	N/A	100	100	100	Inspektorat, BKAD	Seluruh PD	
2. Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100	100	100	100	BKD-Diklat	Seluruh PD	
	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	49,16	50	60	70	BKD-Diklat	Seluruh PD	
	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	80	100	100	100	BKD-Diklat	Seluruh PD	
	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	151,5	175	200	225	BKD-Diklat	Seluruh PD	
	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	62,2	65	67,5	70	SETDA	Seluruh PD	
		Employer Branding*	N/A	5	5,5	6	SETDA	Seluruh PD	
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,6	86	87	88	SETDA	Seluruh PD
			Indeks Pelayanan Publik	3,99	4	4,2	4,4	SETDA	Seluruh PD

KABUPATEN PULUBANG	DINAS/DIRJEN KANTOR	ASS	SEKDA	WADUP
1	1	1	1	1

Dalam melaksanakan RB General, rencana aksi merupakan salah satu instrumen rencana pelaksanaan kegiatan utama dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana aksi RB General yaitu :

- Aksi yang dimaksud harus merupakan aksi yang memiliki dampak langsung terhadap capaian kegiatan utama
- Jelas dan terukur
- Target triwulan merupakan akumulasi dari triwulan-triwulan sebelumnya
- Rencana aksi merupakan output dari Tim RB General
- Rencana aksi unit kerja dapat terdiri dari penjabaran atas rencana aksi pemerintah daerah dan inisiatif unit kerja jika diperlukan
- Jika unit kerja memiliki Rencana Aksi di luar mandat level pusat, maka inisiatif tersebut harus melalui proses validasi level pusat terlebih dulu sebelum dimasukkan sebagai Rencana Aksi RB Unit Kerja.
- Rencana Aksi RB General dan Tematik dapat beririsan, sehingga dalam proses perencanaan RB Mikro, perlu dikoordinasikan secara komprehensif oleh Sekretaris Daerah

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi RB General perlu didukung oleh kolaborasi dan keterlibatan unsur terkait. Faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan RB general adalah sebagai berikut :

a. Komitmen Pimpinan

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran untuk berubah (*commitment to change*). Hal ini ditandai dengan adanya keterlibatan yang aktif dari pimpinan maupun seluruh jajaran, sehingga ide-ide luar biasa dan inovatif akan lebih mudah muncul serta responsif menangkap pesan dari masyarakat untuk membawa organisasi ke arah yang tepat dan lebih maju

b. Menyelesaikan Akar Masalah

Dalam pelaksanaan RB perlu untuk menyelesaikan akar masalah sehingga tidak hanya fokus pada permasalahan yang terjadi, namun mengetahui dengan jelas penyebab yang signifikan untuk diintervensi sesuai rencana aksi yang telah disusun

c. Kolaborasi

Kolaborasi diperlukan untuk mempercepat tercapainya tujuan RB, baik kolaborasi internal, lintas unit kerja maupun dengan stakeholder

d. Inovatif

Pelaksanaan RB yang semakin tinggi tuntutananya perlu dilakukan dengan

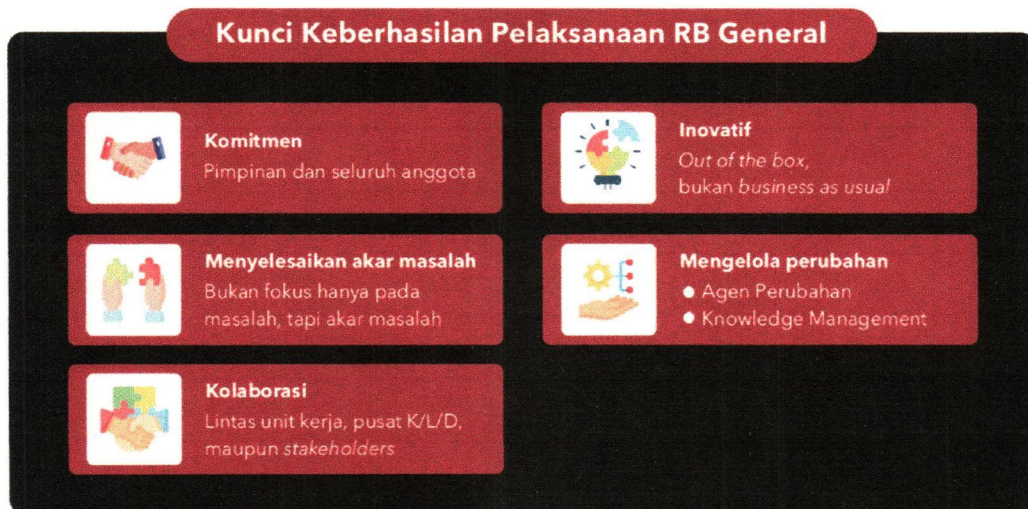
KABAG HUKUM	DINASIBADANI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

cara-cara inovatif, tidak dengan cara-cara yang prosedural dan terlampau birokratis. K/L/D diharapkan dapat terbuka dengan hal-hal baru, berpikir ke depan dan *out of the box*.

e. Mengelola Perubahan Melalui Agen Perubahan dan Penerapan *Knowledge Management*

Agar resistensi dapat dikurangi dan keberhasilan RB dapat dipercepat, maka dalam pengelolaan perubahan dapat dilakukan dengan strategi Agen Perubahan dan *Knowledge management* yang tepat. Agen perubahan merupakan perorangan/tim yang berperan sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi masukan alternatif solusi, dan penghubung komunikasi dalam proses pembangunan RB. Adapun penerapan *Knowledge management* diharapkan efektif meningkatkan kualitas pemahaman dan persepsi seluruh entitas internal maupun eksternal yang terkait dengan pelaksanaan RB.

Gambar 3.1
Kunci Keberhasilan Pelaksanaan RB General



C. Penetapan Tema dan Target RB Tematik

RB Tematik merupakan strategi yang dirumuskan untuk menjawab percepatan dampak konkrit RB terhadap isu hilir yaitu capaian pembangunan nasional. Melalui RB Tematik, Pemerintah Daerah lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB Tematik

RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar masalah tata kelola pemerintahan yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan.

RB Tematik memiliki waktu pelaksanaan hingga 2024. Dengan waktu yang

KARAG HUKUM	DINAS/BAKAM KANTOR	ASS	SEKDA	WASUP
f	h	h	h	

terbatas tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik melalui PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023.

1. Pengentasan Kemiskinan.

RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran

2. Peningkatan Investasi

RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting

4. Percepatan Prioritas Aktual Preside

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi

Dari 4 tema tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan tema yang

KAB/DAK HILKUMI	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WADUP
4	1	1	8	

ada sebagai fokus RB Tematik pada tahun berjalan. Tentunya dalam menentukan atau menetapkan tema fokus RB Tematik harus melalui analisis data yang ada.

➤ Kemiskinan

Pada 10 tahun terakhir angka kemiskinan Kabupaten Boalemo menunjukkan progres yang fluktuatif, dari semula 20,79% Tahun 2014 naik mencapai 21,67% di tahun 2015 kemudian menunjukkan tren penurunan sampai pada tahun 2020 menjadi 18,57, kembali naik menjadi 19% tahun 2021. Pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Boalemo menekan angka kemiskinan hingga turun mencapai 18,74. Hal ini merupakan pencapaian yang baik, dimana garis kemiskinan Tahun 2022 lebih tinggi dari tahun sebelumnya namun persentase kemiskinan menurun. Meski mengalami penurunan persentase angka kemiskinan, Kabupaten Boalemo masih sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi dari 6 Kab/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk itu agar lebih mencapai efektifitas penurunan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Boalemo menargetkan angka kemiskinan 18,57% tahun 2023 dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

➤ Investasi

Nilai realisasi investasi Kabupaten Boalemo menunjukkan tren yang cenderung menurun setiap tahunnya. Berdasarkan data National Single Window for Investment (NSWI), realisasi nilai investasi tahun 2020 mencapai Rp. 37.722.600.000,- turun signifikan pada tahun 2022 dengan nilai investasi Rp. 13.423.500.000 sangat jauh dari target realisasi Rp. 32.326.309.232. Jika dibandingkan dengan kab/kota di Provinsi Gorontalo, nilai investasi Kabupaten Boalemo masih yang terendah. Selanjutnya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi maka tahun 2023 target realisasi investasi Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 59.559.878.435.

➤ Digitalisasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berupaya mendukung proses digitalisasi menuju pemerintahan yang lebih baik dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Keberhasilan pencapaian pelaksanaan SPBE pada suatu daerah dapat diketahui melalui Indeks SPBE daerah itu sendiri yang ditetapkan oleh KemanPANRB. Kabupaten Boalemo pada hasil evaluasi SPBE tahun 2022 dengan indeks 2,02 predikat cukup telah melebihi target tahun 2023 pada RPD. Meskipun terjadi peningkatan dalam nilai namun masih dalam kategori atau predikat yang cukup. Selanjutnya sebagai komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai indeks, Pemerintah Kabupaten Boalemo menargetkan 2,7 predikat baik diakhir periode Rencana Pembangunan Daerah

KABAG HUKUM	DINASIBADRAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
1	1	1	2	

(RPD) 2023-2026.

Terkait sasaran tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan yang berfokus pada penanganan stunting, Pemerintah Kabupaten Boalemo melakukan berbagai upaya penanganan baik itu dengan membentuk Tim maupun melalui Inovasi digitalisasi. Angka stunting di Kabupaten Boalemo berdasarkan rilis Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kementerian Kesehatan RI berada pada 29,9% di tahun 2022, mengalami kenaikan 0,1 % dari tahun 2021 dan menjadi tertinggi kedua di Provinsi Gorontalo. Tingginya angka stunting Kabupaten Boalemo menjadi perhatian khusus pemerintah daerah sehingga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Boalemo menargetkan mampu melampaui target nasional di tahun 2023 dan 2024.

➤ Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor adalah Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 setiap belanja instansi pemerintah didorong agar mengurangi impor dan banyak memanfaatkan produk dalam negeri. Persentase P3DN Pemerintah Kabupaten Boalemo telah mencapai 62% dari target nasional 40%. Pencapaian ini sudah baik namun masih tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Boalemo karena pengaruhnya terhadap perekonomian daerah. Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Boalemo menetapkan target yang sama dengan pencapaian tahun sebelumnya yaitu 62%.

➤ Inflasi

Penekanan laju inflasi menjadi hal yang terus diupayakan oleh setiap pemerintah daerah. Inflasi merupakan indikator makro perekonomian yang menggambarkan kondisi ekonomi yang dapat dikatakan kurang sehat. Tingkat inflasi di Kabupaten Boalemo mencapai 4,6% pada penghujung tahun 2022. Capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan Inflasi Provinsi Gorontalo yang mencapai 5,15%. Meski sudah berada pada 4,6% hal ini belum menunjukkan kondisi ekonomi yang baik dan sehat sehingga di tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Boalemo menargetkan 3%.

Dari analisis diatas dapat dilihat bahwa tema kemiskinan dan investasi memiliki tingkat keparahan yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga kedua tema tersebut menjadi tema prioritas dalam RB Tematik Kabupaten Boalemo.

Dalam menentukan target-target yang harus dicapai sesuai tema RB Tematik tentunya perlu memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan

KABAG HUKUM	DINASIBRODI KANTOR	ASS	SEKDA	WADUP
1	2	3	4	

Daerah (RPD) 2023-2026 Kabupaten Boalemo sehingga titik-titik fokus intervensi dapat dilaksanakan secara maksimal dalam mendorong pencapaian RB Tematik. Kesesuaian tersebut dapat dilihat melalui tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026.

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran dan Program Pada RPD 2023-2026 Dalam Pelaksanaan RB Tematik

NO	TEMA	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 2023-2026		
		TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
1	KEMISKINAN	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya agribisnis, peran kelembagaan ekonomi masyarakat dan kualitas sumber daya produktif daerah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
				Program Penyediaan dan pengembangan sarana Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan tangkap
				program Pengelolaan perikanan budidaya
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Program Pengembangan Umkm
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
				Meningkatnya status desa dan pemerataan wilayah
Meningkatnya pembangunan suprastruktur, infrastruktur, dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian dan pelayanan dasar serta konektivitas Boalemo dengan daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dan di daerah teluk tomini	Program pengembangan Perumahan			
	Program Perumahan dan 26elola26 pemukiman kumuh			
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			

KABUPATEN HUKUM	DINAS/BAKAM KANTOR	ASS	SEKDA	WADUP
f	h	d	g	

		Peningkatan Kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas 27elola27an27 dan literasi masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan
			Meningkatnya akses dan layanan 27elola27an bagi masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	INVESTASI	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya agribisnis, peran kelembagaan ekonomi masyarakat dan kualitas sumber daya produktif daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3	DIGITALISASI PEMERINTAHAN	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Optimal	Meningkatnya kualitas tata 27elola pelayanan publik	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika
4	PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Optimal	Meningkatnya kualitas tata 27elola pelayanan publik	Program Perekonomian Dan Pembangunan
5	INFLASI	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya agribisnis, peran kelembagaan ekonomi masyarakat dan kualitas sumber daya produktif daerah	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Optimal	Meningkatnya kualitas tata 27elola pelayanan publik	Program Perekonomian Dan Pembangunan

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABU
1	1	1	2	

Tabel 3.4
 Target RB Tematik Kabupaten Boalemo

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET TAHUNAN		LEADING SECTOR
				2023	2024	
Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	18,74	18,57	18,14	BAPPPEDA
Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi daerah	13,4 Milyar	59,5 Milyar	68,4 Milyar	DPM-PTSP
Digitalisasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	29,9	17	14	DINAS KESEHATAN (TPPS)
Penggunaan Produk dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	62%	62%	65%	DINAS KUMPERINDA G
Inflasi	Terkendalinya Tingkat Inflasi daerah	Tingkat Inflasi	4,6	3	3	SEKRETARIAT DAERAH (TPID)

D. Identifikasi Masalah

RB tematik telah dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir. Melalui RB Tematik Pemerintah Kabupaten Boalemo dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan tema dalam RB Tematik. Konsep RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Sehingga dengan teratasinya akar permasalahan pada tata kelola pemerintahan diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari RB Tematik perlu dilakukan identifikasi masalah.

1. Kemiskinan

Penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Boalemo telah menjadi prioritas dalam pembangunan daerah hal ini dibuktikan dari RPJMD 2017-2022 sampai dengan RPD 2023-2026 persentase kemiskinan menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah, namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Tentunya terdapat hal yang mendasar menjadi penyebab sulitnya pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan. Pada dokumen perancaan

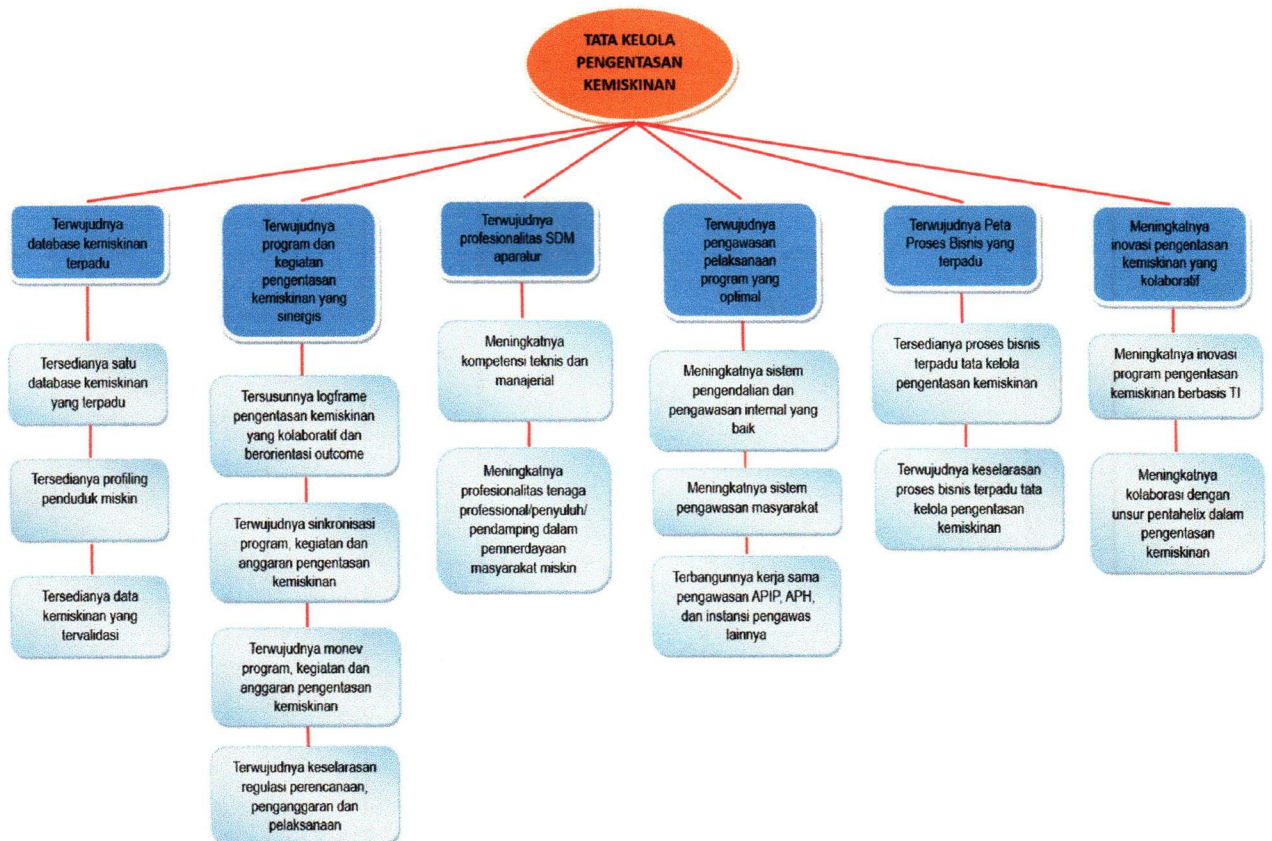
KAB. BOALEMO	DINAS/BAKOR	ASS	SEKDA	WASUP
4	6	1	3	

pemerintah daerah telah didukung oleh program kegiatan yang mampu mengatasi persoalan kemiskinan namun pada tingkat pelaksanaannya atau tata kelolanya yang belum maksimal, yaitu :

- Pengelolaan data penanggulangan kemiskinan belum maksimal
- Perencanaan dan pelaksanaan program belum dilakukan secara terpadu,
- Belum tersedia peta proses bisnis penanggulangan kemiskinan secara terpadu
- Pengawasan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masih lemah

Dari persoalan tersebut dapat digambarkan logika program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

Gambar 3.2
Logical Framework Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Boalemo



2. Investasi

Berdasarkan analisis data sebelumnya menunjukkan rendahnya nilai investasi daerah, tentunya hal ini bukanlah yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Rendahnya investasi daerah berpengaruh pula pada

KARAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WASUP
1	1	1	1	

pertumbuhan ekonomi daerah sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah daerah yang dapat mendukung peningkatan investasi daerah baik dalam aspek Kapasitas SDM, iklim investasi, promosi dan pengawasan.

- Kapasitas SDM

Minimnya SDM yang bersertifikasi kompetensi dalam bidang penanaman modal, perijinan, bahasa asing dan pelayanan publik

- Iklim Investasi

Belum terpenuhinya peta potensi investasi dan fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha UMKM

- Promosi

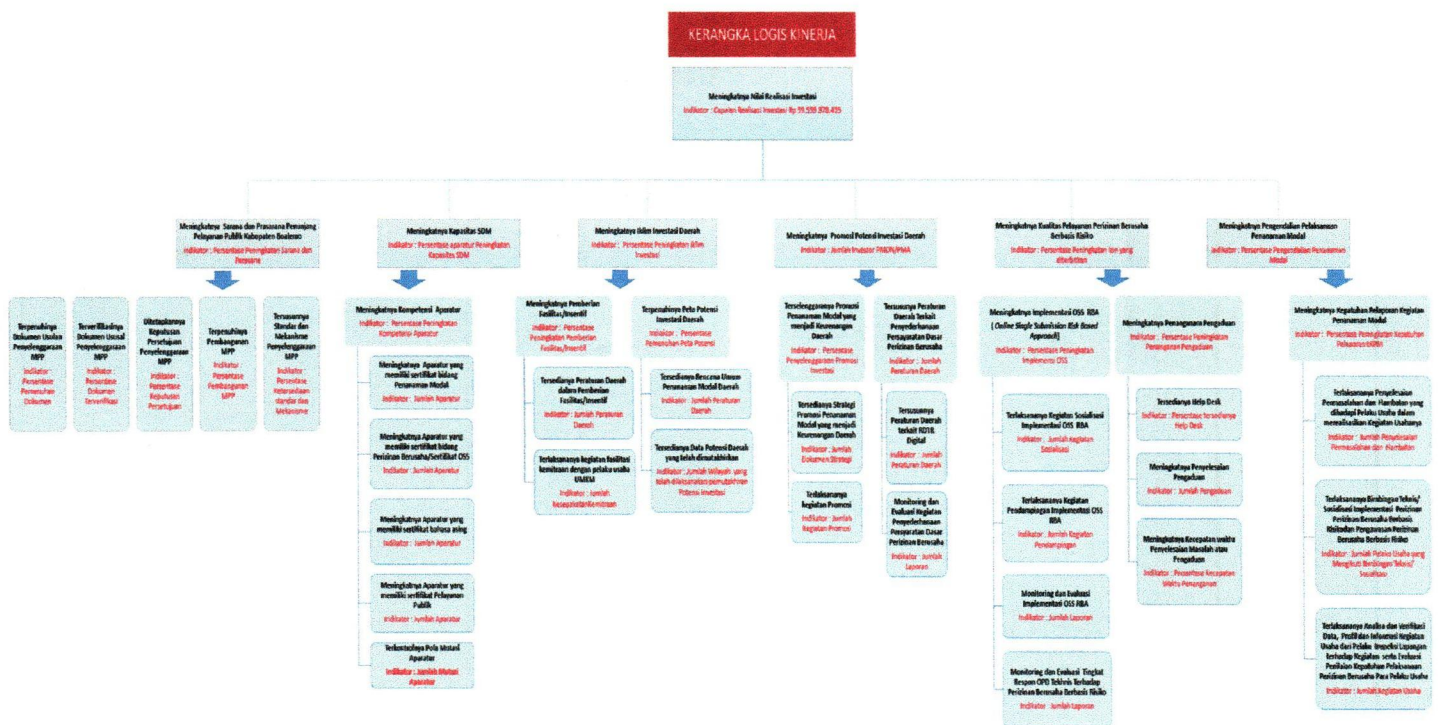
Rendahnya kemampuan daerah dalam menjual potensi investasi daerah

- Pengawasan

Rendahnya kepatuhan pelaporan kegiatan penanaman modal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, arah kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai investasi daerah sebagaimana kerangka logis kinerja berikut :

Gambar 3.3
Kerangka Logis Kinerja Peningkatan Nilai Investasi Daerah



Dalam melaksanakan RB Tematik yang berdampak dan berkesinambungan perlu adanya rencana aksi yang merupakan rencana pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

KABAG HUKUM	DINAS IRADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WASUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI KABUPATEN BOALEMO

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Boalemo mengacu pada kebijakan Road Map Nasional sebagaimana di atur dalam PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sebagaimana ketentuan peraturan tersebut penajaman pelaksanaan RB dilakukan dalam dua fokus yaitu RB General dan RB Tematik. Dalam melaksanakan RB agar berjalan dengan baik, maka yang perlu dilakukan adalah pengelolaan RB yang baik. Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB yaitu :

1. Menetapkan Road Map
2. Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB
3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi
4. Monitoring dan evaluasi RB
5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya

A. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Dalam pengelolaan RB di Kabupaten Boalemo terdiri dari *Strategic Transformation Unit (STU)*, *Leading Institution* pengampuh RB General dan *Leading Sector* pengampu RB Tematik.

1. *Strategic Transformation Unit (STU)*

Strategic Transformation Unit (STU) terdiri dari para Staf Ahli Kepala Daerah yang berfungsi menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah serta menindaklanjuti rekomendasi dari evaluator internal untuk perbaikan selanjutnya.

2. *Leading Institution* pengampuh RB General

Leading Institution pengampuh RB General merupakan perangkat daerah pengampuh indikator kinerja pelaksanaan RB General yang memiliki peran, kewenangan dan tanggungjawab untuk menetpkan target capaian kinerja peleksanaan RB General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WADUP
				

tahunan RB General yang telah ditetapkan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB General sesuai dengan indikator yang diampuh, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB General. Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB General yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan RB General yang diampuh setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi RB Nasional.

3. *Leading Sector* pengampu RB Tematik

Leading Sector pengampu RB Tematik merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional

B. Pengelola RB Perangkat Daerah

Dalam menjamin efektifitas dan efisiesi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Boalemo yang secara teknis opsional dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka perlu dibentuk Pengelola RB dilingkup Perangkat Daerah dengan struktur yang diketuai langsung oleh Kepala Prangkat Daerah dan membawahi Pelaksana RB General dan Pelaksana RB Tematik. Adapun Pelaksana RB General dimaksud diketuai oleh Sekretaris perangkat Daerah dan Pelaksana RB Tematik diketuai oleh Kepala Bidang Teknis.

C. Mintoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan suatu keharusan untuk dilakukan dalam rangka mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik di level pemerintah daerah dan perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi dapat memberikan informasi penting apabila pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASE	SEKDA	WAKIL
				

Inspektorat Daerah atau Tim Evaluasi Internal (APIP) yang dibentuk melaksanakan evaluasi internal pelaksanaan RB General maupun RB tematik secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan untuk :

1. Mengukur ketercapaian rencana aksi RB (General dan Tematik)
2. Memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RB kepada STU, dan
3. Menyampaikan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi kepada Evaluator Nasional paling lambat akhir Oktober setiap tahunnya melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional

KABAG HUKUM	DINAS/BIRO/DAIRAH KANTOR	ASS	SEKDA	WASUP
1	6	1	3	

BAB V

PENUTUP

Road Map merupakan dokumen perubahan yang mengintegrasikan berbagai agenda reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya organisasi untuk melaksanakan berbagai agenda reformasi birokrasi di Kabupaten Boalemo. Keberhasilan dalam melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi yang tertuang dalam road map tematik ini tergantung pada tingkat komitmen, keteguhan dan konsistensi dari seluruh elemen birokrasi yang ada diseluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk selalu menjaga capaian kinerja dari reformasi birokrasi. Tanpa dilandasi semangat-semangat tersebut road map ini hanya akan menjadi suatu dokumen yang tidak akan bisa memberikan manfaat sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan, yakni membawa keberhasilan untuk seluruh agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Boalemo.

Road map tematik ini juga diharapkan akan mampu menjadi panduan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam rangka percepatan implementasi Reformasi Birokrasi tematik dalam mengurai masalah dan isu strategis menuju birokrasi kelas dunia di tahun 2025.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.


Pj. BUPATI BOALEMO,
SHERMAN MORIDU